

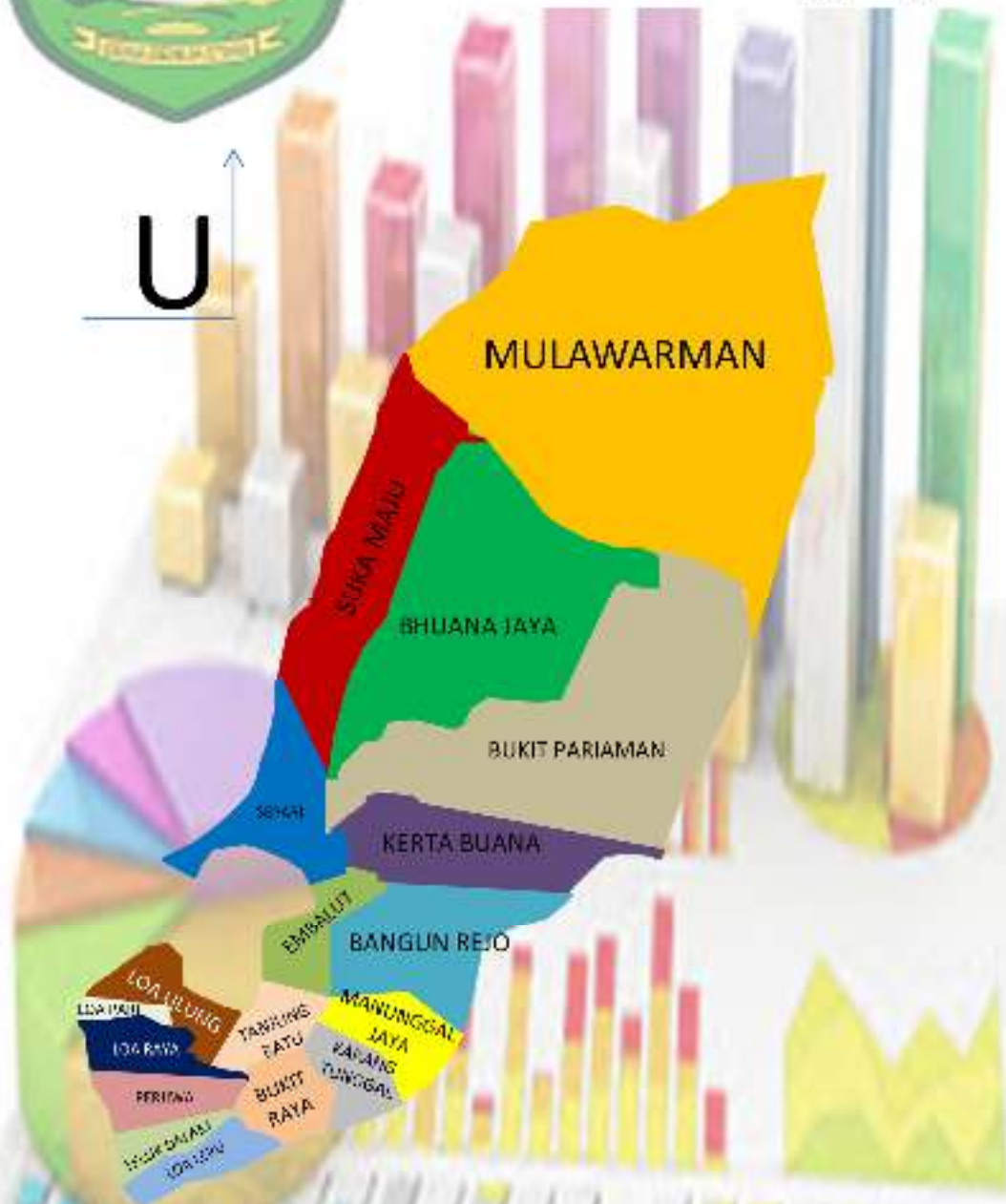


# Rancangan Rencana Kerja

## RENJA AKHIR TA 2026

### Kecamatan Tenggara Seberang

U



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG**

JL. Mulawarman No.16 Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang  
Website : <https://tenggarongseberang.kukarkab.go.id> , Email : [tenggarongseberang@kukarkab.go.id](mailto:tenggarongseberang@kukarkab.go.id)  
TENGGARONG SEBERANG 75572

**KEPUTUSAN CAMAT TENGGARONG SEBERANG**

Nomor : P- 186 /SK/TGRS-SET.I/900.1.1.2/7/2025

**TENTANG**

**TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)  
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG TAHUN 2026  
CAMAT TENGGARONG SEBERANG**

- Menimbang : a. Bahwa Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 telah ditetapkan oleh Camat Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Bahwa Rancangan RENSTRA Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, perlu dijabarkan dalam Rencana Tahunan yaitu Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tenggarong Seberang;
- c. Bahwa dengan pertimbangan point a dan b tersebut di atas, perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana terlampir.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 4150);
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004,tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Mendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 29 tahun 2025 tentang RKPD Kutai Kartanegara tahun 2026, tertanggal 25 Juli 2025.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN CAMAT TENGGARONG SEBERANG TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG TAHUN 2026.**

**Pertama** : Rencana Kerja Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026, selanjutnya disebut dengan RENJA kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026, merupakan Dokumen Perencanaan untuk Tahun Anggaran 2026

**Kedua** : Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Camat Tenggarong Seberang

**Ketiga** : Menunjuk Aparatur Sipil Negri (ASN) yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja (RENJA) tahun 2026 di Lingkungan Kecamatan Tenggarong Seberang

**Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tenggarong Seberang

Pada Tanggal : 1 Juli 2025

---

**CAMAT TENGGARONG SEBERANG,**



**TEGO YUWONO, S.Sos., M.Si**

Pembina Tk I/ IV/b

NIP. 196610241990031004

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT TENGGARONG SEBERANG

Nomor : P- 186 /SK/TGRS-SET.I/900.1.1.2/7/2025

Tanggal : 1 Juli 2025

Tentang : Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan  
Tenggarong Seberang

Nama Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja (RENJA) di Lingkungan  
Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026

No	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	TEGO YUWONO, S.Sos., M.S.i	Camat	Penanggung Jawab
2	HENDRA SURYANA, S.IP., M.Si	Sekretaris Camat	Ketua
3	RINDA LESTARI, A.Md	Plt. Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan	Sekretaris Merangkap Anggota
4	OKINU RAHIM, SP	Kasubbag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Anggota
5	YAH DINAL, S.Sos., M.Si	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota
6	YULIANTO, SE	Kasi Pemerintahan	Anggota
7	MUHAMMAD JUNAIDI, S.Sos	Plt. Kasi Pelayanan Umum	Anggota
8	Dra. RUSMIATI	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
9	ISMAIL, SH	Kasi Trantib dan Linmas	Anggota
10	YOS ARI WIBOWO, S.Hut., M.Si	Analisis Laporan Realisasi Anggaran	Anggota
11	TITIN DWI SUPRIHATIN, A.Md	Pengelola Program dan Laporan	Anggota
12	ESTER DWI WAHYUNINGSIH	Pengadministrasi	Anggota

Ditetapkan : di Tenggarong Seberang

Pada Tanggal : 1 Juli 2025

**PCAMAT TENGGARONG SEBERANG,**

**TEGO YUWONO, S.Sos., M.Si**

Pembina Tk I/ IV/b

NIP. 196810241990031004

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanauwata'ala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2026 dapat diselesaikan tepat waktu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 yang kemudian diperjelas kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2026 ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan guna menjaga konsistensi dan sinergitas program dan kegiatan sehingga dapat dengan optimal mendukung proses pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemahaman yang cermat terhadap program-program prioritas dan isu-isu strategis Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara maupun langkah-langkah yang diperlukan, akan menghasilkan Renja yang bukan saja akan lebih berkualitas dan implementatif, tetapi lebih jauh lagi akan bermanfaat bagi penyusunan langkah antisipatif sehingga perencanaan yang dihasilkan menjadi sinergis dan tepat sasaran.

Pada akhirnya Renja Kecamatan Tenggarong Seberang ini diharapkan dapat berguna secara optimal sehingga rencana hasil yang diharapkan dapat dicapai dengan optimal pula dan semakin dapat dirasakan oleh khususnya masyarakat Kecamatan Tenggarong Seberang dan pada umumnya Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.



Tenggarong Seberang, Juli 2025  
Camat Tenggarong Seberang,

**TEGO YUWONO, S.Sos.M.Si**

Pembina Tk I/ IV/b  
NIP. 19681024 199003

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika penulisan .....	5
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..	15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	19
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	20
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	37
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	151
3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....	151
3.2.1. Tujuan .....	151
3.2.2. Sasaran .....	152
<b>BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	
4.1. Program dan Kegiatan .....	153
<b>BAB V. PENUTUP</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 LATAR BELAKANG**

Dengan ditetapkannya UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu kepada RKPD, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara disusun berdasarkan cita-cita masyarakat sebagaimana tertuang dalam Grand Strategy pembangunan yang dikenal dengan nama KUKAR IDAMAN ( Inovatif, Daya Saing dan Mandiri) yang dicanangkan sejak terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2021-2026.

### **I.2 LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 3 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas Perencanaan Pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut menghasilkan :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM);
- c. Rencana Pembangunan Tahunan (RPT).

Rencana Pembangunan Tahunan untuk kabupaten/kota disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat (pasal 5 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004).

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjangka meliputi :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah);
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RK PD).

Selanjutnya pada pasal 151 ayat (1) dinyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra -SKP memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa Renstra SKPD tersebut dirumuskan dalam bentuk rencana kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi Masyarakat.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 menyatakan bahwa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) menyusun Renja-SKPD.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026.
9. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara No. 6 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat.
- 10 Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 247/SK-BUP/HK/2021 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Tugas Camat dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.
- 11 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 29 tahun 2025 tentang RKPd Kutai Kartanegara tahun 2026, tertanggal 25 Juli 2025..

### **I.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1. Maksud**

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja SKPD Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026.

#### **2. Tujuan**

Untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2026.

### **I.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

#### **1 PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan

- 4. Sistem Matika Penulisan
- II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
  - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
  - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
  - 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
  - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
  - 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
  - 3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
  - 4.1 Program dan Kegiatan
- V PENUTUP

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Rencana Kerja (RENJA) suatu SKPD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis SKPD. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan- kegiatan atau program yang telah di susun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan.

Laporan Kinerja adalah Iktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan Kinerja dapat dilihat dari dua hal; yaitu pencapaian (i) kinerja output dan (ii) kinerja keuangannya. Yang dimaksud dengan kinerja output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut.

##### **A. Analisis Kinerja Output**

Berdasarkan data-data yang ada kinerja keluaran (output performance) hampir 100% menunjukkan kinerja keluaran yang sempurna, yaitu capaian kinerjanya 100% jika dibandingkan

dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam DPA kegiatan. Artinya, hampir seluruh PPTK mampu merealisasikan indikator kinerja dengan sempurna (jumlah buku, laporan, peta, pelaksanaan kursus/pelatihan, dll)

**B Analisis Kinerja Keuangan**

Analisa Kinerja keuangan dilakukan untuk melihat efisiensi realisasi penyerapan dana berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat melalui kinerja keuangan per program

**C Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut :**

Tabel TC. 29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025  
Provinsi/Kabupaten/Kota Kutai Kartanegara  
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Kinerja (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD) Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100	95	95	95	100%	98	98	98%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45	9	9	9	100%	9	27	60%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	10	2	2	2	100%	2	6	60%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	5	1	1	1	100%	1	3	60%
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	1	1	1	100%	1	3	60%

7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	5	1	1	1	100%	1	3	60%
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD	5	1	1	1	100%	1	3	60%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	2	2	2	100%	2	6	60%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	1	1	1	100%	1	3	60%
7.01.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	200	-	-	-	100%	200	-	0%
7.01.01.2.01.010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25	-	-	-	100%	25	2	8%
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel</b>	<b>100</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>100%</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>86%</b>
		<b>Tersedianya gaji dan tunjangan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
		<b>Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan	60	12	12	12	100%	12	36	60%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20	4	4	4	100%	-	-	0%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	1	1	1	100%	1	3	60%
7.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	15	3	3	3	100%	3	9	60%

7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	20	4	4	4	100%	4	12	60%
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10	2	2	2	100%	2	6	60%
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5	1	1	1	100%	1	3	60%
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik daerah	1	1	-	-	100%	1	1	100%
7.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	1	-	-	100%	1	1	100%
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	5	1	1	1	100%	1	3	60%
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	5	1	1	1	100%	1	3	60%
<b>7.01.01.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian</b>	<b>100</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>100%</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85%</b>
		<b>Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan</b>	<b>100</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>100%</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95%</b>
		<b>Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dilaksanakan</b>	<b>80</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>100%</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>81%</b>
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	370	74	74	74	100%	74	222	60%
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	370	74	74	74	100%	74	222	60%
7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dilaksanakan	5	1	1	1	100%	1	3	60%

7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5	1	1	1	100%	1	3	60%
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20	4	4	4	100%	4	12	60%
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15	3	3	3	100%	3	9	60%
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>100%</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>100%</b>
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	50	10	10	10	100%	10	30	60%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	300	60	60	60	100%	60	180	60%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	215	43	43	43	100%	43	129	60%
		Jumlah Makanan dan Minuman	4.800	960	960	960	100%	960	2.880	60%
7.01.01.2.06.0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	876.940	175388	175388	175388	100%	175.388	526.164	60%
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan	1.800	360	360	360	100%	360	1.080	60%
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	60	12	12	12	100%	12	36	60%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	475	95	95	95	100%	95	285	60%
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tata Kelola Arsip	400	80	80	80	100%	80	240	60%
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah	5	1	1	1	100%	1	3	60%
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5	1	1	1	100%	1	3	60%

<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang diadakan	2.315	463	463	463	100%	463	1.389	60%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	12	12	12	100%	12	36	60%
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	12	12	12	100%	12	36	60%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	60	12	12	12	100%	12	36	60%
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	50	10	10	10	100%	10	30	60%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	50	10	10	10	100%	10	30	60%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5	1	1	1	100%	1	3	60%
7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	125	25	25	25	100%	25	75	60%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5	1	1	1	100%	1	3	60%
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5	1	1	1	100%	1	3	60%
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>100%</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>100%</b>

		Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan								
7.01.02.2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10	0	0	0	100%	2	2	20%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6	0	0	0	100%	1	1	17%
7.01.02.2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	0	0	0	100%	1	1	17%
7.01.02.2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	500	100	100	100	100%	100	300	60%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait	45	9	9	9	100%	9	27	60%
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

7.01.03.2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
7.01..03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7.01..03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	90	18	18	18	100%	18	54	60%
7.01.03.2.03	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	30	0	0	0	100%	5	5	17%
07.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>100</b>	<b>85</b>	<b>100%</b>
7.01.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>100</b>	<b>85</b>	<b>100%</b>
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12	-	-	-	-	2	2	17%
7.01.04.2.02	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>100</b>	<b>85</b>	<b>100%</b>
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	-	-	-	-	2	2	17%

07.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	100	-	-	-	0%	100	85	100%
7.01.05.2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Capaian Jumlah Output urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan secara amanah dan bermanfaat</b>	100	-	-	-	0%	2	2	100%
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	90	18	18	18	100%	18	54	60%
7.01.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik</b>	100	90	90	90	100%	90	90	90%
7.01.06.2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan</b>	100	100	100	100	100%	100	100	100%
		<b>Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	90	0	0	0	0%	18	18	20%
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	90	18	18	18	100%	18	54	60%
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	14	0	0	0	100%	0	-	0%

7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	90	18	18	18	100%	18	54	60%
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	90	18	18	18	100%	18	54	60%

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Tenggarong Seberang dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Nilai SAKIP Perangkat Daerah
- Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP
- Tingkat aksesibilitas wilayah Kecamatan
- Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan yang aktif  
Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan;
- Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- Persentase Desa yang memiliki predikat penyelenggaraan kinerja pemerintahan
- Desa dalam kategori baik

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Tenggarong Seberang meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

### 1. Lingkungan Internal:

Kekuatan :

- Visi dan misi organisasi yang jelas

- Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
- Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
- Kewenangan koordinasi di tingkat kecamatan
- Adanya sarana dan prasarana

Kelemahan :

- Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
- Belum maksimalnya koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya
- Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi organisasi
- Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan

## 2. Lingkungan Eksternal

Peluang

- RPJM Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026
- Agenda pembangunan tahunan kabupaten Kutai Kartanegara
- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
- Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
- Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
- Diklat peningkatan kualitas aparatur
- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
- Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram

Ancaman :

- Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai
- Masih Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
- Pratek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
- Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat
- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
- Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas.

**TABEL TC-30**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah KecamatanTenggarong seberang  
Kabupaten Kutai Kartanegara**

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			95	95	98	100	100	98	98	98	98	
2	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9	9	9	9	9	9	36	36	36	
3	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel			85	85	86	100	100	86	86	86	86	
4	Tersedianya gaji dan tunjangan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			95	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah			100	100	100	100	100	85	85	85	85	
7	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian			75	85	85	95	100	95	95	95	95	
8	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan			75	85	95	95	100	65	65	65	65	

9	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dilaksanakan			55	60	65	70	75	98	98	98	98	
10	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			98	98	98	98	98	100	100	100	100	
11	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
13	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara			100	100	100	100	100	67	67	67	67	
14	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP			65	67	67	67	67	67	67	67	67	
15	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
16	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat			95	100	100	100	100	100	100	100	100	
17	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
18	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
19	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan			85	85	85	85	85	100	85	85	85	

	Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan												
20	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			85	85	85	85	100	85	85	85		
21	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik		90	90	90	90	100	90	90	90	90		
22	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan		100	100	100	100	100	100	100	100	100		
23	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100	100	100	100	100	100	100	100	100		

### **II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

#### **a. Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Kecamatan Tenggarong Seberang.**

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.

Kecamatan Tenggarong Seberang sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan masyarakatan berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi.

Kecamatan Tenggarong Seberang masih memerlukan peningkatan pelayanan menghadapi tantangan kedepan sebagai Pusat Kegiatan wilayah (PKW), terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain :

1. Prasarana dan sarana yang tersedia masih kurang lengkap dan belum memadai
2. Sistem kerja yang belum optimal
3. Sumber daya manusia yang belum optimal
4. Kapasitas kelembagaan desa belum optimal
5. Infrastruktur pedesaan masih kurang pada Renja Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2025 dan yang akan datang tahun 2026

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tenggarong Seberang, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus dipacu dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada

pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Profesionalitas pelayanan kecamatan sebagai salah satu SKPD Kabupaten Kutai Kartanegara yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur.
4. Mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi melalui multi stakeholder yang ada di Kecamatan Tenggarong Seberang.

b. Isu Strategis Eksternal.

Kinerja dan Sinergitas antara instansi OPD, Dinas dan Pemerintah Daerah serta instansi/institusi lainnya, yaitu :

1. Penguatan Peran Kecamatan.
2. Otonomi Desa yang bersinergi.
3. Masyarakat yang aktif dan religius

#### **II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2026 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan

dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan. Pada tahun anggaran 2026 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai Lampiran.

Tabel T-C.31.  
Review Terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2026

Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah : Kantor Camat Tenggarong Seberang

Lembar :

dari:

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan						
Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80	Nilai	12.089.540.654	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80	Nilai	9.095.207.359	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7	Dokumen	390.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7	Dokumen	320.000.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Tenggarong Seberang	2	Dokumen	30.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Tenggarong Seberang	2	Dokumen	40.000.000	Perbaikan pagu menjadi 40.000.000, penambahan pagu 10.000.000 untuk kegiatan penyusunan dokumen renja 2027
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Tenggarong Seberang	1	Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Tenggarong Seberang	1	Dokumen	-	Pagu awal Rp 5000000. Perbaikan pagu menjadi 0 (masuk dalam penyusunan

														dokumen renja)
7.01.01.2.0 1.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Tenggara Seberang	1	Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Tenggara Seberang	1	Dokumen	-	Pagu awal Rp 5000000 . Perbaikan pagu menjadi 0 ( masuk dalam penyusunan dokumen renja)	
7.01.01.2.0 1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Tenggara Seberang	4	Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Tenggara Seberang	2	Dokumen	30.000.000	menyesuaikan kebutuhan dokumen yang di buat	
7.01.01.2.0 1.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kecamatan Tenggara Seberang	2	Data	300.000.000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kecamatan Tenggara Seberang	2	Data	250.000.000	Penyesuaian Pasca Evaluasi Prov Menjadi : Rp. 200.000.000 untuk kegiatan data statistik sektoral	
7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		18	Laporan	9.344.551.994	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		18	Laporan	7.424.563.599		
7.01.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Tenggara Seberang	12	Orang/Bulan	9.234.551.994	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Tenggara Seberang	12	Orang/Bulan	7.314.563.599	Data BPKAD : 7,314,563,599.33 Semula :	

													9,234,551,994.00
7.01.01.2.0 2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Tenggara Seberang	1	Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Tenggara Seberang	1	Laporan	10.000.000	sesuai
7.01.01.2.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Tenggara Seberang	4	Laporan	100.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Tenggara Seberang	4	Laporan	100.000.000	sesuai
7.01.01.2.0 3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>		3	Dokumen	110.800.000	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>		3	Dokumen	90.800.000	
7.01.01.2.0 3.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik daerah	Kecamatan Tenggara Seberang	1	Dokumen	50.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik daerah	Kecamatan Tenggara Seberang	1	Dokumen	50.000.000	sesuai
7.01.01.2.0 3.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Tenggara Seberang	1	Laporan	20.000.000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Tenggara Seberang	1	Laporan	-	Pagu awal Rp 20000000 . Perbaikan pagu menjadi 0 ( masuk dalam Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD)
7.01.01.2.0 3.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Tenggara Seberang	1	Laporan	40.800.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Tenggara Seberang	1	Laporan	40.800.000	sesuai

7.01.01.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian</b>		60	orang	161.000.000	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian</b>		60	orang	15.000.000	
7.01.01.2.0 5.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	<b>Kecamatan Tenggara Seberang</b>	60	Paket	114.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	<b>Kecamatan Tenggara Seberang</b>	60	Paket	-	pengurangan Pagu
7.01.01.2.0 5.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	<b>Kecamatan Tenggara Seberang</b>	60	Dokumen	4.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	<b>Kecamatan Tenggara Seberang</b>	60	Dokumen	-	pengurangan Pagu
7.01.01.2.0 5.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	<b>Kecamatan Tenggara Seberang</b>	1	Dokumen	4.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	<b>Kecamatan Tenggara Seberang</b>	1	Dokumen	-	pengurangan Pagu
7.01.01.2.0 5.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	<b>Kecamatan Tenggara Seberang</b>	1	Dokumen	4.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	<b>Kecamatan Tenggara Seberang</b>	1	Dokumen	-	pengurangan Pagu
7.01.01.2.0 5.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	<b>Kecamatan Tenggara Seberang</b>	4	Orang	20.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	<b>Kecamatan Tenggara Seberang</b>	4	Orang	-	pengurangan Pagu
7.01.01.2.0 5.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<b>Kecamatan Tenggara Seberang</b>	8	Orang	15.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<b>Kecamatan Tenggara Seberang</b>	8	Orang	15.000.000	sesuai
7.01.01.2.0 6	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia</b>		9	Layanan	745.256.260	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia</b>		9	Layanan	338.261.360	
7.01.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	<b>Kecamatan Tenggara Seberang</b>	12	Paket	29.413.760	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	<b>Kecamatan Tenggara Seberang</b>	12	Paket	29.413.760	sesuai

7.01.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Tenggara Seberang	1 2	Paket	85.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Tenggara Seberang	1 2	Paket	50.000.000	Pagu awal Rp 85000000 . Perbaikan pagu menjadi 50000000
7.01.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Tenggara Seberang	8	Paket	100.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Tenggara Seberang	8	Paket	130.000.000	Tambahan Pasca Evaluasi Prov Menjadi : Rp. 130.000.000
7.01.01.2.0 6.0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Tenggara Seberang	1 2	Paket	70.155.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Tenggara Seberang	1 2	Paket	31.698.000	Pagu awal Rp 70.155.000 . Perbaikan pagu menjadi 31.698.000 sesuai dengan anggaran pada tahun 2025 ( e pantau)
7.01.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kecamatan Tenggara Seberang	2	Paket	3.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kecamatan Tenggara Seberang	2	Paket	-	pengurangan Pagu
7.01.01.2.0 6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Tenggara Seberang	1 2	Laporan	50.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Tenggara Seberang	1 2	Laporan	20.000.000	Pagu awal Rp 5000000 . Perbaikan pagu menjadi 20000000 ( bisa mendapat suport anggaran dari Penyediaan Bahan logistik )

7.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Tenggara Seberang	1 2	Laporan	307.087.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Tenggara Seberang	1 2	Laporan	50.000.000	Pagu awal Rp 307087500 . Perbaikan pagu menjadi 50000000 ( wilayah tengah maksimal Rp 50 jt)
7.01.01.2.0 6.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Tenggara Seberang	5 0	Dokumen	50.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Tenggara Seberang	5 0	Dokumen	20.000.000	Pagu awal Rp 50000000 . Perbaikan pagu menjadi 20000000
7.01.01.2.0 6.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Tenggara Seberang	8	Dokumen	50.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Tenggara Seberang	8	Dokumen	7.149.600	Pagu awal Rp 50000000 . Perbaikan pagu menjadi 7149600 sesuai dengan anggaran pada tahun 2025 ( e pantau)
7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		1 2	Bulan	719.557.400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		1 2	Bulan	418.457.400	
7.01.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Tenggara Seberang	1	Laporan	5.100.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Tenggara Seberang	1 2	Laporan	2.000.000	Pagu awal Rp 5100000 . Perbaikan pagu menjadi 2.000.000
7.01.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Tenggara Seberang	1 2	Laporan	344.457.400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Tenggara Seberang	1 2	Laporan	344.457.400	sesuai

7.01.01.2.0 8.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Tenggara Seberang	1 2	Laporan	20.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Tenggara Seberang	1 2	Laporan	-	pengurangan Pagu
7.01.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Tenggara Seberang	1 1	Laporan	350.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Tenggara Seberang	1 1	Laporan	72.000.000	pengurangan Pagu
7.01.01.2.0 9	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</b>		4 8	Unit	618.375.000	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</b>		4 8	Unit	488.125.000	
7.01.01.2.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Tenggara Seberang	1 8	Unit	190.250.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Tenggara Seberang	1 0	Unit	60.000.000	pengurangan Pagu
7.01.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Tenggara Seberang	2 0	Unit	128.125.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Tenggara Seberang	1 0	Unit	128.125.000	sesuai
7.01.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kecamatan Tenggara Seberang	3 0	Unit	25.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kecamatan Tenggara Seberang	1 4	Unit	25.000.000	sesuai
7.01.01.2.0 9.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	Kecamatan Tenggara Seberang	2	Unit	25.000.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	Kecamatan Tenggara Seberang	2	Unit	25.000.000	sesuai
7.01.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Tenggara Seberang	1	Unit	150.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Tenggara Seberang	1	Unit	150.000.000	sesuai
7.01.01.2.0 9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Kecamatan Tenggara Seberang	2	Unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Kecamatan Tenggara Seberang	2	Unit	100.000.000	sesuai

		Dipelihara/Direhabilitasi	Seberang				Dipelihara/Direhabilitasi	Seberang				
7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP		80	Persen	10.038.900.000	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	80	Persen	24.863.900.000	
		Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan		100	persen			Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	100	persen		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efek		2	Kegiatan	400.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efek	2	Kegiatan	400.000.000	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Tenggara Seberang	2	Laporan	150.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6	Laporan	150.000.000	sesuai
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tenggara Seberang	1	Laporan	250.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	Dokumen	250.000.000	sesuai
7.01.02.2.04	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi		1	Paket	100.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	1	Paket	100.000.000	
7.01.02.2.04.02	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tenggara Seberang	2	Laporan	100.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	Laporan	100.000.000	sesuai

7.01.02.2.0 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat		2	Kegiatan	9.538.900.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat		2	Kegiatan	24.363.900.000	
7.01.02.2.0 2.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Kecamatan Tenggara Seberang	3	Laporan	788.900.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Kecamatan Tenggara Seberang	2	Laporan	788.900.000	sesuai
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		1 1 4	Laporan	8.750.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		1 2 2	Laporan	23.575.000.000	Penambahan pagu PASCA PROVINSI
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif		1 0 0	persen	486.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif		1 0 0	persen	436.000.000	
7.01.03.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan dalam kerjasama antar desa di lingkup kecamatan		2	Kegiatan	100.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan dalam kerjasama antar desa di lingkup kecamatan		2	Kegiatan	100.000.000	
7.01..03.2.0 1.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Tenggara Seberang	8	Lembaga kemasyarakatan	50.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Tenggara Seberang	8	Lembaga kemasyarakatan	50.000.000	sesuai
7.01..03.2.0 1.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tenggara Seberang	2	Laporan	50.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tenggara Seberang	1 9	Laporan	50.000.000	sesuai
7.01.03.2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		1	kegiatan	386.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		1	kegiatan	336.000.000	
7.01.03.2.0 3.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Tenggara Seberang	5	Lembaga kemasyarakatan	386.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Tenggara Seberang	5	Lembaga kemasyarakatan	336.000.000	pengurangan Pagu

07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan		100	persen	225.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan		100	persen	175.000.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani		100	Persen	225.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani		100	Persen	175.000.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		12	laporan	50.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				50.000.000	sesuai
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Tenggara Seberang	2	laporan	175.000.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Tenggara Seberang	12	laporan	125.000.000	PERBAIKAN PAGU
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100	Persen	220.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100	Persen	195.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan yang dilaksanakan		1	Kegiatan	220.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan yang dilaksanakan		1	Kegiatan	195.000.000	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan	Kecamatan Tenggara Seberang	30	Orang	180.000.000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan	Kecamatan Tenggara Seberang	30	Orang	180.000.000	sesuai

		Lokal, Regional, dan Nasional					Lokal, Regional, dan Nasional						
7.01.05.2.0 1.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		1	Dokumen	40.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		1	Dokumen	15.000.000	PERBAIKAN PAGU
7.01.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik</b>		90	Persen	75.000.000	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik</b>		90	Persen	75.000.000	
7.01.06.2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa Yang di fasilitasi		18	Desa	75.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa Yang di fasilitasi		18	Desa	75.000.000	
7.01.06.2.0 1.08	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Tenggara Seberang	1	Dokumen	75.000.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Tenggara Seberang	1	Dokumen	75.000.000	sesuai
J U M L A H						23.134.440.654							34.840.107.359

## **II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

1. Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Tenggarong Seberang pada tahun 2026 hasil dari Musrenbang tingkat desa yang diawali dari gagasan oleh Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi Kemasyarakatan, LPM, Karang Taruna, KPM, RT, sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbang.
2. Di Form Musrenbang menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan
3. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu - isu penting dari masing – masing OPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan

Berikut adalah Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026.

Tabel T-C.32.

## Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

## Kabupaten Kutai Kartanegara

## Nama Perangkat Daerah: Kantor Camat Tenggarong Seberang

No	Kamus Usulan	Permasalahan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
1	Normalisasi Saluran Drainase rt 11 dusun berambai desa bukit pariaman (1462862)	Meningkatkan kapasitas sungai agar aliran sungai tak terhambat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2007 - Bukit Pariaman	Panjang drainase	Volume 1,2 KM	POKIR
2	semenisasi jalan pong tiku rt 05 desa loa ulung (1462936)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2010 - Loa Ulung	Panjang jalan	Volume 0,6 KM	POKIR
3	pengaspalan jalan agatis dusun bangun rejo II (1463015)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2004 - Bangun Rejo	Panjang jalan	Volume 0,6 KM	POKIR

4	pengaspalan jalan dusun bangun rejo I (1463031)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2004 - Bangun Rejo	Panjang jalan	Volume 0,6 KM	POKIR
5	pengaspalan jalan dusun karang rejo desa bangun rejo (1463050)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2004 - Bangun Rejo	Panjang jalan	Vol. 0,6 KM	POKIR
6	semenisasi jalan rt 33 desa bangun rejo (1464033)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2004 - Bangun Rejo	Panjang jalan	Vol. 0,6 KM	POKIR
7	pembangunan parit jalan rt 01 desa bangun rejo	Sering terjadinya banjir saat musim hujan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2004 - Bangun Rejo	Panjang Parit	vol. 1,2 km	POKIR
8	pembangunan parit jalan rt 02 desa	Sering terjadinya banjir	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	64.02.16.2004 - Bangun Rejo	Panjang Parit	vol 1,2 km	POKIR

	bangun rejo (1464480)	saat musim hujan	yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				
9	pembangunan parit jalan rt 03 Bangun Rejo I desa bangun rejo (1464500)	Sering terjadinya banjir saat musim hujan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2004 - Bangun Rejo	Panjang Parit	vol. 1,2 km	POKIR
10	pembangunan parit jalan rt 04 dusun bangun rejo I desa bangun rejo	Sering terjadinya banjir saat musim hujan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2004 - Bangun Rejo	Panjang Parit	vol. 1,2 km	POKIR
11	pembangunan parit jalan rt 07 ds. bangun rejo II desa bangun rejo	Sering terjadinya banjir saat musim hujan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2004 - Bangun Rejo	Panjang Parit	vol. 1,2 km	POKIR
12	pembangunan parit jalan rt 08 dusun bangun rejo II desa bangun rejo (1464632)	Sering terjadinya banjir saat musim hujan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan	64.02.16.2004 - Bangun Rejo	Panjang Parit	vol 1,2 km	POKIR

			Lain yang Dilimpahkan				
13	pembangunan parit jalan rt 13 dusun putuk rejo desa bangun rejo (1464654)	Sering terjadinya banjir saat musim hujan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2004 - Bangun Rejo	Panjang Parit	vol 1,2 km	POKIR
14	pembangunan parit jalan rt 15 desa bangun rejo (1464694)	Sering terjadinya banjir saat musim hujan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2004 - Bangun Rejo	Panjang Parit	vol 1,2 km	POKIR
15	pembangunan parit jalan rt 17 desa bangun rejo dusun sumber rejo (1464708)	Sering terjadinya banjir saat musim hujan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2004 - Bangun Rejo	Panjang Parit	vol. 1,2 km	POKIR
16	pembangunan parit jalan rt 18 desa bangun rejo dusun sumber rejo desa (1464723)	Sering terjadinya banjir saat musim hujan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan	64.02.16.2004 - Bangun Rejo	Panjang Parit	vol 1,2 km	POKIR

			Lain yang Dilimpahkan				
17	pembangunan parit jalan rt 19 desa bangun rejo dusun sumber rejo (1464737)	Sering terjadinya banjir saat musim hujan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2004 - Bangun Rejo	Panjang Parit	vol. 1,2 km	POKIR
18	pembangunan parit jalan rt 20 desa bangun rejo dusun sumber rejo (1464749)	Sering terjadinya banjir saat musim hujan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2004 - Bangun Rejo	Panjang Parit	vol 1,2 km	POKIR
19	pembangunan parit jalan rt 21 desa bangun rejo dusun sumber rejo (1464761)	Sering terjadinya banjir saat musim hujan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2004 - Bangun Rejo	Panjang Parit	vol. 1,2 km	POKIR
20	pembangunan parit jalan rt 23(depan h mansur) desa bangun rejo (1466095)	Sering terjadinya banjir saat musim hujan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan	64.02.16.2004 - Bangun Rejo	Panjang Parit	vol. 1,2 km	POKIR

			Lain yang Dilimpahkan				
21	pembangunan parit jalan rt 26 desa bangun rejo (1466144)	Sering terjadinya banjir saat musim hujan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2004 - Bangun Rejo	Panjang Parit	vol 1,2 km	POKIR
22	pembangunan parit jalan rt 29 desa bangun rejo (1466189)	Sering terjadinya banjir saat musim hujan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2004 - Bangun Rejo	Panjang Parit	vol 1,2 km	POKIR
23	Pengerasan Agregat Jalan Fajar Lestari RT.03 Desa Manunggal Jaya (1239800)	Jalan belum ada pengerasan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2001 - Manunggal Jaya	Panjang jalan	vol 0,6 km	POKIR
24	Pengerasan Jalan RT.22 Desa Manunggal Jaya (1239802)	Jalan belum ada pengerasan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan	64.02.16.2001 - Manunggal Jaya	Panjang jalan	vol. 0,6 km	POKIR

			Lain yang Dilimpahkan				
25	Pengerasan Jalan Mekarsari RT.10 Desa Manunggal Jaya (1239824)	Jalan belum ada pengerasan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2001 - Manunggal Jaya	Panjang jalan	vol 0,6 km	POKIR
26	Pengerasan Jalan Dwi Karya Desa Manunggal Jaya (1239834)	Jalan belum ada pengerasan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2001 - Manunggal Jaya	Panjang jalan	vol 0,6 km	POKIR
27	Pembuatan Badan Jalan Murni Desa Manunggal Jaya (1239836)	Jalan masih terlihat sempit	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2001 - Manunggal Jaya	Panjang jalan	vol 0,6 km	POKIR
28	Pembuatan Badan Jalan Kemangi Desa Manunggal Jaya (1239840)	Jalan masih terlihat sempit	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan	64.02.16.2001 - Manunggal Jaya	Panjang jalan	vol 0,6 km	POKIR

			Lain yang Dilimpahkan					
29	Penurapan Parit RT.10 Desa Manunggal (1239854)	Jaya	Sering terjadinya banjir saat musim hujan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2001 - Manunggal Jaya	Panjang Parit	vol 0,6 km	POKIR
30	Penurapan Parit RT.22 Desa Manunggal (1239856)	Jaya	Sering terjadinya banjir saat musim hujan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2001 - Manunggal Jaya	Panjang Parit	vol 0,6 km	POKIR
31	Pembuatan Parit Jalan Daud RT.02 Desa Embalut (1239861)	Embalut	Sering terjadinya banjir saat musim hujan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2003 - Embalut	Panjang Parit	vol 1,2 km	POKIR
32	Pembuatan Parit Samping Kuburan RT.13 Desa Embalut (1239866)	Embalut	Sering terjadinya banjir saat musim hujan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan	64.02.16.2003 - Embalut	Panjang Parit	vol. 1,2 km	POKIR

			Lain yang Dilimpahkan				
33	Pembangunan Slab Dacker Jalan Cut Nyak Dien RT.03 Desa Loa Pari (1239885)	Sering terjadinya banjir saat musim hujan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2016 - Loa Pari	Panjang drainase	vol. 0,6 km	POKIR
34	Pembangunan Pagar Kuburan RT.13 Desa Embalut (1240055)	Sering terjadinya banjir saat musim hujan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2003 - Embalut	Panjang pagar	vol 250 m	POKIR
35	Pembuatan Parit Jalan Jendral Sudirman RT.02 dan RT.03 Desa Loa Pari (1240166)	Sering terjadinya banjir saat musim hujan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2016 - Loa Pari	Panjang parit	vol. 0,6 km	POKIR
36	Pembuatan Parit RT.03 Desa Loa Lepu (1268051)	Sering terjadinya banjir saat musim hujan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan	64.02.16.2014 - Loa Lepu	Panjang parit	vol. 0,6 km	POKIR

			Lain yang Dilimpahkan				
37	Pengurukan Gang Husein RT.06 Desa Loa Lepu (1268066)	Gang sering terkena banjir	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2014 - Loa Lepu	Panjang jalan	vol. 0,6 km	POKIR
38	Pengurukan Jalan Manggis RT.06 Desa Loa Lepu (1268078)	Jalan sedikit rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2014 - Loa Lepu	Panjang jalan	vol. 0,6 km	POKIR
39	Pembuatan Slab Dacker Jalan A.M. Idris Desa Loa Lepu (1268106)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2014 - Loa Lepu	Panjang jalan	vol. 0,6 km	POKIR
40	Pengurukan Jalan Langsung RT.01 Desa Loa Lepu (1274856)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan	64.02.16.2014 - Loa Lepu	Panjang jalan	vol 0,6 km	POKIR

			Lain yang Dilimpahkan				
41	Penurapan Jalan AP.Mangkunegara Gang Berkah RT.01 Desa Loa Lepu (1274877)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2014 - Loa Lepu	Panjang jalan	vol. 0,6 km	POKIR
42	Penurapan Gang Pinang RT.01 Desa Loa Lepu (1274896)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2014 - Loa Lepu	Panjang drainase	Vol. 0,6 km	POKIR
43	Pengurukan Jalan Salak RT.06 Desa Loa Lepu (1275033)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2014 - Loa Lepu	Panjang drainase	vol 0,6 km	POKIR
44	Pemasangan Paving Halaman Gedung BPU Desa Loa Lepu (1275078)	Halaman BPU rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan	64.02.16.2014 - Loa Lepu	Panjang drainase	.	POKIR

			Lain yang Dilimpahkan				
45	Pembuatan Parit Jalan Semangka RT.03 Desa Loa Lepu 1275119	Sering terjadinya banjir saat musim hujan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2014 - Loa Lepu	Panjang drainase	vol. 0,6 km	POKIR
46	Pengerasan Jalan Langsung RT.07 Desa Loa Pari (1275246)	Jalan berbahaya bagi masyarakat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2016 - Loa Pari	Panjang drainase	Vol 0,6 Km	POKIR
47	Penurapan Jalan Kresno 1 Desa Manunggal (1278911)	Masyarakat mengeluh karna kondisi jalannya	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2001 - Manunggal Jaya	Panjang drainase	vol 0,6 km	POKIR
48	Pemasangan Paving Jalan Gang Cilik 3 RT.01 Desa Bangun Rejo (1278960)	Masyarakat mengeluh karna kondisi jalannya	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan	64.02.16.2004 - Bangun Rejo	Panjang drainase	vol 700 m2	POKIR

			Lain yang Dilimpahkan				
49	Pembuatan Slab Dacker RT.03 Desa Perjiwa (1278968)	Masyarakat mengeluh karna kondisi jalannya	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2012 - Perjiwa	Panjang drainase	vol. 1 unit	POKIR
50	Pembuatan Slab Dacker RT.05 Desa Perjiwa (1278975)	Masyarakat mengeluh karna kondisi jalannya	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2012 - Perjiwa	Panjang drainase	vol 1 unit	POKIR
51	Pembuatan Parit RT.02 Desa Perjiwa (1278981)	Sering terjadinya banjir saat musim hujan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2012 - Perjiwa	Panjang drainase	vol. 0,6 km	POKIR
52	Pembuatan Parit Jalan Gunung Kyai Desa Perjiwa (1278988)	Sering terjadinya banjir saat musim hujan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan	64.02.16.2012 - Perjiwa	Panjang drainase	vol. 0,6 km	POKIR

			Lain yang Dilimpahkan				
53	Pembuatan Badan Jalan RT.03 Desa Perjiwa (1278994)	Masyarakat mengeluh karna kondisi jalannya	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2012 - Perjiwa	Panjang jalan	vol 0,6 km	POKIR
54	Pengurukan Badan Jalan Asari RT.06 Desa Loa Lepu (1443561)	Masyarakat mengeluh karna kondisi jalannya	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2014 - Loa Lepu	Panjang jalan	vol. 0,6 km	POKIR
55	Pengaspalan Gang Keluarga 1 Desa Loa Raya (1443582)	Masyarakat mengeluh karna kondisi jalannya	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2011 - Loa Raya	Panjang jalan	vol. 0,6 km	POKIR
56	Pengurukan Jalan Lampiri RT.19 Desa Bukit Raya (1443605)	Masyarakat mengeluh karna kondisi jalannya	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan	64.02.16.2002 - Bukit Raya	Panjang jalan	vol. 0,6 km	POKIR

			Lain yang Dilimpahkan				
57	Pengurukan Jalan Timbul RT.16 Desa Bukit Raya (1443617)	Masyarakat mengeluh karna kondisi jalannya	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2002 - Bukit Raya	Panjang jalan	vol. 0,6 km	POKIR
58	Pembuatan Jembatan Jalan Mekarsari RT.22 Desa Manunggal Jaya (1239804)	Penghubung jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2001 - Manunggal Jaya	Panjang jembatan	Vol. 1 unit	POKIR
59	Pembuatan Slab Dacker Jalan Jendral Sudirman RT.02 dan RT.03 Desa Loa Pari (1239886)	Masyarakat mengeluh karna kondisi jalannya	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2016 - Loa Pari	Panjang jalan	Vol. 1 unit	POKIR
60	Pengerasan Jalan Rondong Jambu RT.02 Desa Perjiwa (431970)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan	64.02.16.2012 - Perjiwa	Panjang jalan	Vol. 0,6 km	POKIR

			Lain yang Dilimpahkan				
61	Pembangunan Drainase RT. 03 Desa Kertabuana (1335946)	Meningkatkan kapasitas sungai agar aliran sungai tak terhambat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2005 - Kerta Buana	Panjang drainase	Vol. 0,6 km	POKIR
62	Lanjutan Pembangunan Drainase Lingkungan RT. 05 Desa Suka Maju (1424497)	Meningkatkan kapasitas sungai agar aliran sungai tak terhambat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2015 - Suka Maju	Panjang drainase	vol. 0,6 km	POKIR
63	Pembangunan Drainase RT. 10 Desa Manunggal Jaya (1424754)	Meningkatkan kapasitas sungai agar aliran sungai tak terhambat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2001 - Manunggal Jaya	Panjang drainase	vol. 0,6 km	POKIR
64	Lanjutan Pembangunan Drainase RT. 06 dan RT.07 Desa Kerta buana (1481607)	Meningkatkan kapasitas sungai agar aliran sungai tak terhambat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan	64.02.16.2005 - Kerta Buana	Panjang drainase	vol. 0,6 km	POKIR

			Lain yang Dilimpahkan				
65	Lanjutan Pembangunan Drainase RT.34 Desa Bukit Pariaman (1481718)	Meningkatkan kapasitas sungai agar aliran sungai tak terhambat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2007 - Bukit Pariaman	Panjang drainase	vol. 0,6 km	POKIR
66	Lanjutan Pembangunan Drainase RT. 26 Desa Bukit Pariaman (1481880)	Meningkatkan kapasitas sungai agar aliran sungai tak terhambat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2007 - Bukit Pariaman	Panjang drainase	vol. 0,6 km	POKIR
67	Lanjutan Pembuatan Badan Jalan Desa Bukit Pariaman RT. 05 (1481926)	Masyarakat mengeluh karna kondisi jalannya	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2007 - Bukit Pariaman	Panjang drainase	vol. 0,6 km	POKIR
68	Normalisasi Saluran Drainase / Pembersihan Sedimentasi Saluran Desa Bhuana Jaya RT. 17 (1481965)	Meningkatkan kapasitas sungai agar aliran sungai tak terhambat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan	64.02.16.2008 - Bhuana Jaya	Panjang drainase	vol. 0,6 km	POKIR

			Lain yang Dilimpahkan				
69	Normalisasi Saluran Drainase (Pembangunan drainase) Desa Segihan RT. 09 (1482054)	Meningkatkan kapasitas sungai agar aliran sungai tak terhambat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.07.2006 - Segihan	Panjang drainase	vol. 0,6 km	POKIR
70	Normalisasi Saluran Drainase Lingkungan (Pembangunan Drainase) Desa Bhuana Jaya RT. 09 (1482076)	Meningkatkan kapasitas sungai agar aliran sungai tak terhambat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2008 - Bhuana Jaya	Panjang drainase	vol. 0,6 km	POKIR
71	Normalisasi Saluran Drainase Lingkungan (Pembangunan Drainase) Desa Mulawarman RT. 04 (1482125)	Meningkatkan kapasitas sungai agar aliran sungai tak terhambat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2009 - Mulawarman	Panjang drainase	vol. 0,6 km	POKIR
72	Pengurukan jalan di RT. 06 Jalan Asari RT.06 DESA LOA LEPU, (1428906)	Masyarakat mengeluh karna kondisi jalannya	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	64.02.16.2014 - Loa Lepu	Panjang drainase	vol. 0,6 km	POKIR

			Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				
73	Pemasangan batu terpot Jalan Bengsang 1 RT. 05 Jalan Bengsang 1 RT. 05 DESA LOA LEPU, (1428952)	Masyarakat mengeluh karna kondisi jalannya	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2014 - Loa Lepu	Panjang jalan	Vol. 0,12 km	POKIR
74	Pengurukan Jalan Bengsang 3 RT. 05 Jalan Bengsang 3 RT. 05 DESA LOA LEPU, (1428973)	Masyarakat mengeluh karna kondisi jalannya	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2014 - Loa Lepu	Panjang jalan	vol. 0,06 km	POKIR
75	Pembuatan Parit Pasang Batu Rt.09 Desa Karang Tunggal (1456967)	Parit kondisinya tidak baik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2017 - Karang Tunggal	Panjang drainase	vol. 0,06 km	POKIR
76	LANJUTAN SEMENISASI JALAN RT 03 GIRI AGUNG (1483363)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan	64.02.07.2009 - Giri Agung	Panjang jalan	vol. 0,06 km	POKIR

			Lain yang Dilimpahkan				
77	SEMENISASI RT 02 ARGOMULYO GIRI AGUNG (1483378)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.07.2009 - Giri Agung	Panjang jalan	vol. 0,06 km	POKIR
78	DRAINASE RT 04 GIRI AGUNG (1483386)	Meningkatkan kapasitas sungai agar aliran sungai tak terhambat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.07.2009 - Giri Agung	Panjang drainase	vol. 0,06 km	POKIR
79	DRAINASE RT 09 DESA BHUANA JAYA (1483597)	Meningkatkan kapasitas sungai agar aliran sungai tak terhambat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2008 - Bhuana Jaya	Panjang drainase	vol. 0,06 km	POKIR
80	DRAINASE RT 23 DESA BHUANA JAYA (1483603)	Meningkatkan kapasitas sungai agar aliran sungai tak terhambat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	64.02.16.2008 - Bhuana Jaya	Panjang drainase	vo. 0,06 km	POKIR

			Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				
81	DRAINASE RT 01 DESA BHUANA JAYA (1483616)	Meningkatkan kapasitas sungai agar aliran sungai tak terhambat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2008 - Bhuana Jaya	Panjang drainase	vol. 0,06 km	POKIR
82	DRAINASE RT 17 DESA BHUANA JAYA (1483625)	Meningkatkan kapasitas sungai agar aliran sungai tak terhambat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2008 - Bhuana Jaya	Panjang drainase	vol. 0,06 km	POKIR
83	DRAINASE RT 05 DESA BHUANA JAYA (1483633)	Meningkatkan kapasitas sungai agar aliran sungai tak terhambat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2008 - Bhuana Jaya	Panjang drainase	vol. 0,06 km	POKIR
84	DRAINASE RT 14 DESA BHUANA JAYA (1483643)	Meningkatkan kapasitas sungai agar aliran sungai tak terhambat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan	64.02.16.2008 - Bhuana Jaya	Panjang drainase	vol. 0,06 km	POKIR

			Lain yang Dilimpahkan				
85	PENIGKATAN JALAN RT 23 DESA BHUANA JAYA (1483655)	Meningkatkan kapasitas sungai agar aliran sungai tak terhambat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2008 - Bhuana Jaya	Panjang jalan	vol. 0,06 km	POKIR
86	PENIGKATAN JALAN RT 10 DESA BHUANA JAYA (1483663)	Meningkatkan kapasitas sungai agar aliran sungai tak terhambat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2008 - Bhuana Jaya	Panjang jalan	vol. 0,06 km	POKIR
87	PENIGKATAN JALAN RT 17 DESA BHUANA JAYA (1483689)	Meningkatkan kapasitas sungai agar aliran sungai tak terhambat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2008 - Bhuana Jaya	Panjang jalan	vol. 0,06 km	POKIR
88	DRAINASE RT 16 DESA BHUANA JAYA (1483693)	Meningkatkan kapasitas sungai agar aliran sungai tak terhambat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan	64.02.16.2008 - Bhuana Jaya	Panjang drainase	vol. 0,06 km	POKIR

			Lain yang Dilimpahkan				
89	DRAINASE RT 02 DESA BHUANA JAYA (1483704)	Meningkatkan kapasitas sungai agar aliran sungai tak terhambat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2008 - Bhuana Jaya	Panjang drainase	vol. 0,06 km	POKIR
90	TURAP RT 02 DESA BHUANA JAYA (1483733)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2008 - Bhuana Jaya	Panjang drainase	vol. 0,06 km	POKIR
91	SEMENISASI PARIT POROS P MARSUDI RT 02 DESA KARANG TUNGGAL (1485773)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2017 - Karang Tunggal	Panjang drainase	vol. 0,06 km	POKIR
92	TURAP RT 14 DESA KARANG TUNGGAL, (1485783)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan	64.02.16.2017 - Karang Tunggal	Panjang drainase	vol. 0.06 km	POKIR

			Lain yang Dilimpahkan				
93	REHABILITASI GORONG-GORONG JLN KARANG TUNGGAL RT 06/07 DESA KARANG TUNGGAL, (1485913)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2017 - Karang Tunggol	Panjang gorong - gorong	vol. 0.06 km	POKIR
94	SEMENISASI PARIT RT 08 DESA KARANG TUNGGAL, (1485952)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2017 - Karang Tunggol	Panjang jalan	vol. 0.06 km	POKIR
95	SEMENISASI PARIT RT 09 DESA KARANG TUNGGAL, (1485966)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2017 - Karang Tunggol	Panjang drainase	vol. 0.06 km	POKIR
96	LANJUTAN PENURAPAN LAPANGAN BOLA MEKAR JAYA RT 10 , (1486056)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan	64.02.07.2014 - Mekar Jaya	Panjang drainase	vol. 0.06 km	POKIR

			Lain yang Dilimpahkan				
97	SEMENISASI JL KURMA I DAN KURMA II DESA KARANG TUNGGAL,(1486135 )	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2017 - Karang Tungal	Panjang jalan	vol. 0.06 km	POKIR
98	PENINGKATAN JLN RT 17 DESA BUKIT RAYA (1486670)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2002 - Bukit Raya	Panjang jalan	vol. 0.06 km	POKIR
99	Lanjutan Pengaspalan Jl. Ahmad Muksin RT 6 Desa Loa Lepu (1117357)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2014 - Loa Lepu	Panjang jalan	vol. 0.06 km	POKIR
100	Pembuatan Turap Parit jalan RT 10 Desa Manunggal Jaya (1479816)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	64.02.16.2001 - Manunggal Jaya	Panjang turap	vol. 0.06 km	POKIR

			Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				
101	Pembuatan Semenisasi Parit RT 13 Desa Manunggal Jaya,(1491402)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2001 - Manunggal Jaya	Panjang parit	vol. 0.06 km	POKIR
102	Normalisasi Parit Kelompok Tani Murni RT 10 Desa Manunggal jaya , (1491405)	Parit kondisinya tidak baik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2001 - Manunggal Jaya	Panjang drainase	vol. 0.12 km	POKIR
103	Pembuatan Semenisasi Parit RT 07 Desa manunggal jaya, (1491411)	Parit kondisinya tidak baik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2001 - Manunggal Jaya	Panjang drainase	vol. 0.12 km	POKIR
104	Turap Parit RT 13 dan RT 21 Desa Manunggal daya, (1491449)	Parit kondisinya tidak baik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan	64.02.16.2001 - Manunggal Jaya	Panjang drainase	vol. 0.12 km	POKIR

			Lain yang Dilimpahkan				
105	Turap Parit RT 07 Desa Manunggal daya, (1491455)	Parit kondisinya tidak baik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2001 - Manunggal Jaya	Panjang drainase	vol. 0.06 km	POKIR
106	Pengurukan badan jalan di Kelompok Tani Muda Sejahtera Desa Manunggal daya, (1491458)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2001 - Manunggal Jaya	Panjang drainase	vol. 0.06 km	POKIR
107	Semenisasi Parit RT 22 Desa Manunggal Jaya, (1491475)	Parit kondisinya tidak baik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2001 - Manunggal Jaya	Panjang drainase	vol. 0.06 km	POKIR
108	Pembuatan Parit jalan Mangga RT 24, (1491496)	Parit kondisinya tidak baik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan	64.02.16 - Tenggarong Seberang	Panjang drainase	vol. 0.06 km	POKIR

			Lain yang Dilimpahkan				
109	Semenisasi Gang Jeruk RT 24, (1491500)	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16 - Tenggaraong Seberang	Panjang jalan	vol. 0.06 km	POKIR
110	Pembuatan Parit RT 22 Desa Manunggal Jaya., (1491508)	Parit kondisinya tidak baik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.02.16.2001 - Manunggal Jaya	Panjang parit	vol. 0.06 km	POKIR
111	ID SIPD: 2316786 Semenisasi Parit Lingkungan RT 014 Desa Bukit Raya	Parit kondisinya tidak baik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	#PASCAPROVINS I 64.02.16.2002 - Bukit Raya	Panjang parit		
112	ID SIPD: 2322671 Semenisasi Jalan Gang Pawuh RT 015 Desa Bukit Raya	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan	#PASCAPROVINS I 64.02.16.2002 - Bukit Raya	Panjang jalan		

113	ID SIPD: 2308328 Pembangunan Turap Desa Jalan H.Awang Saleh dibantaran sungai Palajawan Desa Tanjung Batu	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Lain yang Dilimpahkan	#PASCAPROVINS I 64.02.16.2018 - Tanjung Batu	Panjang turap		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				
114	ID SIPD: 2140738 Pembangunan Turap Sungai Alam RT.04 Desa Bangun Rejo	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	#PASCAPROVINS I 64.02.16.2004 - Bangun Rejo	Panjang turap		
115	ID SIPD: 2140214 Pembangunan Jembatan Beton Buk Petung RT.01 Desa Bangun Rejo	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	#PASCAPROVINS I 64.02.16.2004 - Bangun Rejo	Panjang turap		
116	ID SIPD: 2319515 Pembangunan Turap Dusun Rejo Makmur RT 014 Desa Karang Tunggal	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	#PASCAPROVINS I 64.02.16.2017 - Karang Tunggal	Panjang turap		

			Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				
117	ID SIPD: 2310800 Pembangunan Turap Jalan Dusun Sumber Jaya RT 19 Desa Manunggal Jaya	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	#PASCAPROVINS I 64.02.16.2001 - Manunggal Jaya	Panjang turap		
118	ID SIPD: 2315236 Pembuatan Drainase RT 021 Dusun Sidomakmur Desa Bhuana Jaya	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	#PASCAPROVINS I 64.02.16.2008 - Bhuana Jaya	Panjang drainase		
119	ID SIPD: 2316157 Peningkatan jalan RT 03 Desa Bhuana Jaya	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	#PASCAPROVINS I 64.02.16.2008 - Bhuana Jaya	Panjang jalan		
120	ID SIPD: 2210485 Pembangunan Jembatan Jalan Bhirawa RT.008 Desa Suka Maju	Penghubung jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	#PASCAPROVINS I 64.02.16.2015 - Suka Maju	Panjang jembatan		

			Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				
121	ID SIPD: 2311696 Semenisasi Jalan Lampiri RT 019 Desa Bukit Raya	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	#PASCAPROVINS I 64.02.16.2002 - Bukit Raya	Panjang jalan		
122	ID SIPD: 2311709 Penurapan jalan RT 03 Desa Bhuana Jaya	Aktivitas warga terhambat karna jalan rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	#PASCAPROVINS I 64.02.16.2008 - Bhuana Jaya	Panjang turap		

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas public. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Tenggarong Seberang dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa ;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

## **3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama satu tahun.

### **3.2.1 Tujuan**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan layanan dan tugas serta fungsi SKPD. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan juga merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Kecamatan Tenggarong Seberang sebagai organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu tahun sampai dengan lima tahun kedepan, memformulasikan tujuan strategis dan mempertimbangkan sumber daya serta kemampuan yang dimiliki. Dengan merumuskan tujuan strategis, Kecamatan Tenggarong Seberang dapat diukur sejauh mana visi dan misi Kecamatan telah dicapai dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan. Agar keberhasilan Kecamatan Tenggarong Seberang dalam mencapai tujuan strategisnya dapat diukur, maka setiap tujuan strategis yang ditetapkan disertai indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.

Rumusan Tujuan Renja Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pernyataan visi SKPD

2. Hasil perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD

### 3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Untuk selanjutnya dirumuskan Sasaran Renja Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel :

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Tenggarong Seberang Kab.Kutai Kartanegara Tahun 2026.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan Sasaran	Target kinerja	
				Satuan	2026
1	Meningkatkan Kinerja Pembangunan Kewilayahan di Kecamatan Tenggarong Seberang.	Meningkatnya Layanan Administrasi di Kecamatan Tenggarong Seberang	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Persen	80
			Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP	Persen	80
			Persentase Desa yang melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang Tertib dan baik	Persen	80

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1 Program dan Kegiatan**

Rencana Kerja Kantor Camat Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 mencerminkan rencana program dan kegiatan tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis (Renstra) Kantor Camat Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025-2029. Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra), Kantor Camat Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan beberapa program dan kegiatan baik yang telah ditentukan dalam Renstra Kantor Camat Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara maupun kegiatan-kegiatan spesifik kantor sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Kantor Camat Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masyarakat serta pokok-pokok pikiran yang menjadi aspirasi masyarakat secara keseluruhan melalui instansi terkait dalam musrenbang kecamatan setiap tahunnya.

Pengolahan data menyangkut program dan kegiatan tersebut juga disesuaikan lagi dengan kondisi lapangan bahkan ketersediaan dana sebagai pendukung dari program kegiatan yang akan dilaksanakan.

Bila kondisi lapangan kesiapan sumber daya dan anggaran tidak ada kesesuaian maka program kegiatan yang telah direncanakan bisa saja belum dilaksanakan atau tidak dilaksanakan atau bahkan gagal.

Adapun Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai tabel berikut :

Tabel T-C.33.  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2026**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2027**  
**Kabupaten Kutai Kartanegara**

**Nama Perangkat Daerah : Kantor Camat Tenggarong Seberang**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80	Nilai	9.095.207.359			80	Nilai	11.142.635.011
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7	Dokumen	320.000.000			7	Dokumen	510.000.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Tenggarong Seberang	2	Dokumen	40.000.000	APBD	sesuai	2	Dokumen	140.000.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Tenggarong Seberang	4	Laporan	30.000.000	APBD	sesuai	2	Dokumen	70.000.000
7.01.01.2.01.009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kecamatan Tenggarong Seberang	2	Data	250.000.000	APBD	sesuai	2	Data	300.000.000

<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel</b>		<b>18</b>	<b>Laporan</b>	<b>7.424.563.599</b>			<b>18</b>	<b>Laporan</b>	<b>8.351.268.439</b>
<b>7.01.01.2.02.01</b>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	<b>Kecamatan Tenggara Seberang</b>	<b>12</b>	<b>Orang/Bulan</b>	<b>7.314.563.599</b>	<b>APBD</b>	sesuai	<b>12</b>	<b>Orang/Bulan</b>	<b>8.226.268.439</b>
<b>7.01.01.2.02.05</b>	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<b>Kecamatan Tenggara Seberang</b>	<b>1</b>	<b>Laporan</b>	<b>10.000.000</b>	<b>APBD</b>	sesuai	<b>1</b>	<b>Laporan</b>	<b>25.000.000</b>
<b>7.01.01.2.02.07</b>	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	<b>Kecamatan Tenggara Seberang</b>	<b>4</b>	<b>Laporan</b>	<b>100.000.000</b>	<b>APBD</b>	sesuai	<b>4</b>	<b>Laporan</b>	<b>100.000.000</b>
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>		<b>3</b>	<b>Dokumen</b>	<b>90.800.000</b>			<b>3</b>	<b>Dokumen</b>	<b>239.336.520</b>
<b>7.01.01.2.03.02</b>	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik daerah	<b>Kecamatan Tenggara Seberang</b>	<b>1</b>	<b>Dokumen</b>	<b>50.000.000</b>	<b>APBD</b>	sesuai	<b>1</b>	<b>Dokumen</b>	<b>188.160.000</b>
<b>7.01.01.2.03.05</b>	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	<b>Kecamatan Tenggara Seberang</b>	<b>1</b>	<b>Laporan</b>	<b>40.800.000</b>	<b>APBD</b>	sesuai	<b>1</b>	<b>Laporan</b>	<b>51.176.520</b>
<b>7.01.01.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian</b>		<b>60</b>	<b>orang</b>	<b>15.000.000</b>			<b>60</b>	<b>orang</b>	<b>18.816.000</b>

7.01.01.2.05.1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Tenggara Seberang	8	Orang	15.000.000	APBD	sesuai	8	Orang	18.816.000
7.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia</b>		9	Layanan	338.261.360			9	Layanan	930.333.612
7.01.01.2.06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Tenggara Seberang	12	Paket	29.413.760	APBD	sesuai	12	Paket	36.896.620
7.01.01.2.06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Tenggara Seberang	12	Paket	50.000.000	APBD	sesuai	12	Paket	106.624.000
7.01.01.2.06.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Tenggara Seberang	8	Paket	130.000.000	APBD	sesuai	8	Paket	125.440.000
7.01.01.2.06.0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Tenggara Seberang	12	Paket	31.698.000	APBD	sesuai	12	Paket	88.002.432
7.01.01.2.06.0 8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kecamatan Tenggara Seberang	12	Laporan	20.000.000	APBD	sesuai	12	Laporan	62.720.000
7.01.01.2.06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Tenggara Seberang	12	Laporan	50.000.000	APBD	sesuai	12	Laporan	385.210.560

7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Tenggara Seberang	50	Dokumen	20.000.000	APBD	sesuai	50	Dokumen	62.720.000
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Tenggara Seberang	8	Dokumen	7.149.600	APBD	sesuai	8	Dokumen	62.720.000
7.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan</b>		12	Bulan	418.457.400			12	Bulan	527.000.440
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Tenggara Seberang	1	Laporan	2.000.000	APBD	sesuai	12	Laporan	6.397.440
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Tenggara Seberang	12	Laporan	344.457.400	APBD	sesuai	12	Laporan	81.563.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Tenggara Seberang	11	Laporan	72.000.000	APBD	sesuai	11	Laporan	439.040.000
7.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</b>		48	Unit	488.125.000			48	Unit	565.880.000
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Tenggara Seberang	18	Unit	60.000.000	APBD	sesuai	10	Unit	14.560.000

7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Tenggara Seberang	20	Unit	128.125.000	APBD	sesuai	10	Unit	175.000.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kecamatan Tenggara Seberang	30	Unit	25.000.000	APBD	sesuai	14	Unit	31.360.000
7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	Kecamatan Tenggara Seberang	2	Unit	25.000.000	APBD	sesuai	2	Unit	31.360.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Tenggara Seberang	1	Unit	150.000.000	APBD	sesuai	1	Unit	188.160.000
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Tenggara Seberang	2	Unit	100.000.000	APBD	sesuai	2	Unit	125.440.000
7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP</b>		80	Persen	24.863.900.000			80	Persen	2.128.000.000
		<b>Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan</b>		100	persen		APBD		100	persen	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang		2	Kegiatan	400.000.000			2	Kegiatan	122.000.000

		<b>dilaksanakan secara efek</b>									
<b>7.01.02.2.01.01</b>	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	<b>Kecamatan Tenggara Seberang</b>	<b>2</b>	<b>Laporan</b>	<b>150.000.000</b>	<b>APBD</b>	sesuai	<b>6</b>	<b>Laporan</b>	<b>87.000.000</b>
<b>7.01.02.2.01.02</b>	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<b>Kecamatan Tenggara Seberang</b>	<b>1</b>	<b>Laporan</b>	<b>250.000.000</b>	<b>APBD</b>	sesuai	<b>12</b>	<b>Dokumen</b>	<b>35.000.000</b>
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi</b>		<b>1</b>	<b>Paket</b>	<b>100.000.000</b>			<b>1</b>	<b>Paket</b>	<b>1.023.000.000</b>
<b>7.01.02.2.04.02</b>	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<b>Kecamatan Tenggara Seberang</b>	<b>2</b>	<b>Laporan</b>	<b>100.000.000</b>	<b>APBD</b>	sesuai	<b>5</b>	<b>Laporan</b>	<b>1.023.000.000</b>
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat</b>		<b>2</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>24.363.900.000</b>			<b>2</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>983.000.000</b>
<b>7.01.02.2.02.03</b>	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	<b>Kecamatan Tenggara Seberang</b>	<b>3</b>	<b>Laporan</b>	<b>788.900.000</b>	<b>APBD</b>	sesuai	<b>2</b>	<b>Laporan</b>	<b>953.000.000</b>
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		<b>122</b>	<b>Laporan</b>	<b>23.575.000.000</b>		prioritas aspirasi musrenbang	<b>9</b>	<b>Laporan</b>	<b>30.000.000</b>

7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif</b>		100	persen	436.000.000			100	persen	540.000.000
7.01.03.2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Jumlah kegiatan dalam kerjasama antar desa di lingkup kecamatan</b>		2	Kegiatan	100.000.000			2	Kegiatan	140.000.000
7.01..03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Tenggara Seberang	8	Lembaga kemasyarakatan	50.000.000	APBD	sesuai	8	Lembaga kemasyarakatan	100.000.000
7.01..03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tenggara Seberang	2	Laporan	50.000.000	APBD	sesuai	19	Laporan	40.000.000
7.01.03.2.03	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>		1	kegiatan	336.000.000			1	kegiatan	400.000.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Tenggara Seberang	5	Lembaga kemasyarakatan	336.000.000	APBD	sesuai	5	Lembaga kemasyarakatan	400.000.000
07.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan</b>		100	persen	175.000.000			100	persen	851.000.000
7.01.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase gangguan ketentraman dan keteriban umum yang tertangani</b>		100	Persen	175.000.000			100	Persen	851.000.000

7.01.04.2.01.0 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		12	laporan	50.000.000	APBD				50.000.000
7.01.04.2.01.0 2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Tenggara Seberang	2	laporan	125.000.000	APBD	sesuai	12	laporan	801.000.000
07.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>		100	Persen	195.000.000			100	Persen	420.000.000
7.01.05.2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah urusan yang dilaksanakan</b>		1	Kegiatan	195.000.000			1	Kegiatan	420.000.000
7.01.05.2.01.0 4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Tenggara Seberang	30	Orang	180.000.000	APBD	sesuai	30	Orang	380.000.000
7.01.05.2.01.0 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		1	Dokumen	15.000.000					40.000.000
7.01.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik</b>		90	Persen	75.000.000			90	Persen	75.000.000
7.01.06.2.01	<b>Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan</b>	<b>Jumlah desa Yang di fasilitasi</b>		18	Desa	75.000.000			18	Desa	75.000.000

	dan Pengawasan Pemerintahan Desa										
7.01.06.2.01.08	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Tenggara Seberang	1	Dokumen	75.000.000	APBD		1	Dokumen	75.000.000
J U M L A H						34.840.107.359					15.156.635.011

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini dapat disusun. Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kerja (Renja) Tahun, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Komunikasi/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
3. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
4. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan

penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Tenggarong Seberang, Juli 2025  
Camat Tenggarong Seberang,  
**TEGO YUWONO, S.Sos.M.Si**  
Pembina Tk I/ IV/b  
NIP. 19681024 199003 1 004

